

ABSTRAKSI

Krisis politik di Suriah telah mengalami instabilitas kronis yang memicu protes massal dan internasional sejak awal 2011 terkait protes politik mengenai undang-undang darurat dan menuntut agar tahanan politik dibebaskan. Konflik ini semakin melebar setelah seorang penduduk al-Hasaka, Hasan Ali Akhleh membakar diri dengan menyirami tubuhnya dengan bensin. Protes internasional semakin meluas setelah banyaknya serangan yang dilemparkan oleh tentara loyalis pemerintah ke areal rakyat sipil. Isu penggunaan senjata kimia ini memuncak pada pertengahan Agustus 2013, dimana dalam pertempuran di pinggiran ibukota Damaskus, dilaporkan, lebih dari 400 orang tewas akibat senjata kimia berupa gas sarin, mustard dan VX.

Rusia lewat hak vetonya selalu menginginkan upaya dan pencapaian perdamaian di Suriah dengan cara-cara yang lebih diplomatis. Rusia juga didukung oleh China dalam memberi penekanan bahwa dengan cara seperti ini bukan berarti mereka mendukung tindakan kekerasan yang terjadi di Suriah yang diklaim dilakukan oleh rezim yang berkuasa, melainkan Rusia merasa bahwa penegakan kedaulatan dan integritas sebuah bangsa harus dijunjung tinggi. Rusia berupaya untuk mencegah agar dominasi Amerika Serikat masuk ke dalam Suriah dalam menghentikan penggunaan senjata kimia yang digunakan agar bisa menjadi sebuah momentum dan penentu bagi Rusia yang ingin membantu Suriah dalam memusnahkan senjata kimia.

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Rusia untuk memveto draft resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai konflik di Suriah. Landasan Konseptual yang digunakan adalah Teori Hegemoni, Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Perimbangan Kekuasaan (BoP). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pengumpulan data dan metode analisis. Ketiga teori yang digunakan menjelaskan bagaimana alur konflik Suriah mem

pengaruhi *power* negara dalam memperkuat dirinya untuk tetap menjadi *role model* dalam kerangka memperluas, mempertahankan serta memimpin sebagai bagian dalam meraih kekuasaan. Selain itu, *power* tersebut dapat menjadi sebuah akses dan media dalam mencapai kepentingan nasional serta tindakan suatu negara untuk *survive* dalam politik internasional. Selain itu, perimbangan kekuatan dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol terhadap timbulnya suatu konflik atau pertentangan terutama bagi negara-negara besar.

